

Dinas Tarik Aset Tak Layak

■ DPPKAD Hindari Temuan BPK

MEMPAWAH, TRIBUN - Sejumlah mobil dinas (mobdin) SKPD Kabupaten Pontianak yang sudah tak layak pakai ditarik Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD), Kamis (12/7). Penarikan dilakukan untuk menghapus atau memperbaiki bila masih layak pakai.

"Rencananya ada sepuluh kendaraan dinas yang akan kita tarik. Yang sudah tak layak akan kita hapus dan bagi yang masih layak akan kita perbaiki. Kami ambil satu persatu melalui bantuan Unit Pelaksanaan Tehnis Peralatan (UPTP) workshop di Anjungan," kata Kabid Aset DPPKA, Makmur, Kamis (12/7).

Dikatakannya, penarikan kendaraan yang dilakukan secara bertahap terutama keadaannya yang sudah memprihatinkan. Setelah terkumpul akan dilakukan prosedur per-



TRIBUN/HHI

” Kita akan nilai dulu, bisa diperbaiki atau tidak. Jika rusak parah akan kita hapus atau dilelang sebagai besi tua. ”

MAKMUR

Kabid Aset DPPKA

baikan, dengan melihat separah apa kerusakan kemudian akan dilelang.

"Kita akan nilai dulu, barang ini masih bisa diperbaiki atau tidak. Jika cost perbaikannya masih wajar maka akan diperbaiki. Sebaliknya, jika kondisi rusak keseluruhan akan kita lakukan penghapusan, dilelang sebagai besi tua," terangnya.

Dikatakannya, penghapusan kendaraan dinas yang termasuk aset daerah masanya berkisar lima hingga 8 tahun. Di bawah itu kendaraan masih bisa dilakukan perbaikan atau

perawatan dengan dana yang sudah disiapkan daerah.

"Sebelumnya mobil ini hanya dibiarkan begitu saja, sehingga kalau tidak kita tarik bisa hancur di tempat. Dan bisa jadi temuan BPK jika belum dihapus," ungkapanya.

Sembarangan

Makmur menyesalkan, aset tersebut dibiarkan di tempat terbuka hingga kondisinya makin parah. Seharusnya, kata dia, diletakkan di tempat yang lebih baik.

"Seperti mobil perpustakaan ini, sebelumnya diletakkan di pinggir jalan. Kalau tidak kita ambil lama kelamaan barang ini akan hancur. Kami minta petugas yang memegang kendaraan dinas, agar tidak terjadi seperti ini lagi," tandas Makmur.

Kepala Dinas PU Kabupaten Pontianak, Hamdani, menanggapi dalam hal ini, bahwasanya peraturan kendaraan dinas itu memang sudah ada. Petugas yang mendapat kendaraan dinas, agar melapor ke pemerintah terkait kondisi kendaraannya.

"Kendaraan akan dikumpulkan ke workshop. Yang sudah rusak dan terbengkalai, berarti itu, dari petugasnya yang sengaja tidak melaporkan," ujarnya. (sid)

Siapkan Lahan

ANGGOTA DPRD Kabupaten Pontianak, Eddi Sugito, mengharapkan, ke depan pemerintah bisa menyiapkan lahan untuk menyimpan aset daerah ini. Hal ini agar kendaraan dinas yang sudah rusak dan tak berfungsi tersebut terjaga dan kerusakannya tidak makin parah.

"Ke depannya, pemerintah diharapkan dapat merubah sistem terhadap kendaraan aset daerah ini. Petugas berwenang harus melaporkan apa yang terjadi pada kendaraan. Sehingga jika rusak dan tidak bisa diperbaiki lagi bisa segera ditempatkan pada tempat yang sudah disediakan. Dengan demikian nilai ekonomis dari aset tidak terlalu berkurang jika dilelang," paparnya.

Ia menuturkan, dengan adanya tempat khusus kendaraan dinas yang sudah rusak, pengaturan dalam pencatatan, penghapusan dan pelelangan bisa lebih terkoordinir. Jika dibandingkan saat ini, semua kendaraan hanya dibiarkan. Tanggungjawab dari petu-

gas yang berwenang seakan tidak ada. Mereka pun tidak tahu akan diapakan kendaraan itu. Kalau sudah ada peraturan yang mengatur dan fasilitasnya sudah disediakan, dipastikan tidak akan ada lagi kendaraan rusak dibiarkan begitu saja selama bertahun-tahun.

"Kalau kita perhatikan, kondisi kendaraan saat ini tak layak sama sekali. Padahal, seandainya mendapat perhatian kemungkinan keadaannya tidak akan parah. Sebab perawatan akan segera dilakukan, jika memang sudah tidak layak maka akan segera dilakukan penghapusan," ungkapnya.

Ia menilai kinerja DPP-KAD sudah baik. Mengambil semua kendaraan ke satu tempat untuk dilakukan penilaian dan pelelangan. "Ini merupakan kinerja yang baik, melakukan penarikan kendaraan secara langsung. Sebab jika dibiarkan maka barang itu akan hancur dan bisa saja menjadi temuan BPK mana kala belum dilakukan penghapusan," pungkasnya. (sid)

Lima Mobdin Ditarik

- Pkmp patroli Satpol-PP
- Mobil keliling perpustakaan daerah
- Ambulans RSUD Dr Rubini Mempawah
- Chevrolet staf PU
- Mobil Espass staf Lingkungan Hidup
- Lima lagi yang belum ditarik
- Segera dihapus/lelang
- Hindari jadi temuan BPK
- Dinas sayangkan perawatan
- Dewan sarankan lahan

SUMBER: DPPKAD KABUPATEN PONTIANAK